



RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH **RPJMD**

KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025 - 2029

OLEH : KEPALA BAPPEDA BANGGAI



DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025-2029



- 1** **UU NOMOR 25 TAHUN 2004**
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 2** **UU NOMOR 23 TAHUN 2014**
Tentang Pemerintahan Daerah
- 3** **PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2025**
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
- 4** **PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
- 5** **INMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2025**
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 6** **PERDA KABUPATEN BANGGAI NOMOR 3 TAHUN 2024**
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2025 - 2045
- 7** **PERDA KABUPATEN BANGGAI NOMOR 10 TAHUN 2012**
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Tahun 2012 - 2032



DASAR PELAKSANAAN

PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

■ PASAL 12 AYAT (3)

RKPD SEBAGAIMANA DI MAKSUD DALAM PASAL 11 AYAT (2) HURUF C MERUPAKAN PENJABARAN DARI RPJMD YANG MEMUAT RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH, PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA RENCANA KERJA DAN PENDANAAN UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN YANG DISUSUN DENGAN BERPEDOMAN PADA RKP DAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT.

■ PASAL 14

AYAT 1 : BAPPEDA MENYUSUN RPJPD, RPJMD, DAN RKPD.

AYAT 2 : DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, DAN RKPD SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), **BAPPEDA MELAKUKAN KOORDINASI, SINERGI DAN HARMONISASI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN.**

AYAT 3 : PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, DAN RKPD SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), DILAKUKAN BERBASIS PADA **E-PLANNING.**

■ PASAL 16 AYAT (1)

RPJPD, RPJMD, DAN RKPD SEBAGAIMANA DI MAKSUD DALAM PASAL 11 AYAT (2) DI SUSUN DENGAN TAHAPAN : a. PERSIAPAN PENYUSUNAN; **b. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL**; c. PENYUSUNAN RANCANGAN; d. PELAKSANAAN MUSRENBANG; e. PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR; DAN f. PENETAPAN.



DASAR PELAKSANAAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 (Pasal 48)

- AYAT (1) : Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- AYAT (3) : Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- AYAT (4) : Forum konsultasi publik Daerah kabupaten/kota melibatkan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan.
- AYAT (5) : Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- AYAT (7) : Hasil konsultasi publik kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- AYAT (8) : Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).

DASAR PELAKSANAAN INMENDAGRI NO.2 TAHUN 2025



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota;
3. Ketua DPRD Provinsi; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk

1. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan Ranwal RPJMD;
2. Forum konsultasi publik provinsi melibatkan Bappeda kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan;
3. Forum konsultasi publik Daerah kabupaten/kota melibatkan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan;
4. Forum konsultasi publik dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait;
5. Forum konsultasi publik diharapkan dapat menyepakati beberapa hal diantaranya menyangkut kesesuaian data dan fakta di lapangan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta harapan, saran, dan masukan sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus upaya untuk mewujudkan visi, tujuan, serta sasaran Ranwal RPJMD;
6. Hasil konsultasi publik provinsi dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah Provinsi, Bappeda kabupaten/kota, dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan;
7. Hasil konsultasi publik kabupaten/kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan;
8. Ranwal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik; dan
9. Perangkat Daerah menyesuaikan Ranwal Renstra PD sesuai hasil konsultasi publik.

TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025-2029 (INMENDAGRI 2/2025)

NO	URAIAN KEGIATAN	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember				Keterangan (Sejak Pelantikan)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD																													
	- Pembentukan Tim Penyusun RPJMD	■																												
	- Orientasi Penyusunan RPJMD		■																											
	- Penyiapan Agenda Kerja		■	■																										
	- Penyiapan Data dan Informasi		■	■																										
2	PENYUSUNAN SUBTANSI RPJMD																													
	- Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratis			■	■																									
	- Penyusunan Rancangan Awal RPJMD			■	■																									
	- Konsultasi Publik RPJMD					■	■																							
	- Penyampaian Rancangan Awal RPJMD ke DPRD							■	■																				Paling lambat 40 hari	
	- Pembahasan dan Kesepakatan							■	■																				Dibahas dalam 10 hari kerja	
	- Konsultasi Rancangan Awal RPJMD ke Gubernur									■	■	■	■																	
	- Penyusunan Rancangan RPJMD									■	■	■	■																	
	- Musrenbang RPJMD									■	■	■	■																Paling lambat 75 hari	
	- Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD									■	■	■	■																	
	- Reviu APIP										■	■																	Dilakukan dalam 5 hari kerja	
3	PROSES PENETAPAN RPJMD																													
	- Penyampaian Ranperda kepada DPRD											■	■																Paling lambat 90 hari	
	- Pembahasan dengan DPRD											■	■	■																
	- Persetujuan Bersama												■	■															Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD	
	- Evaluasi Ranperda RPJMD													■	■	■													Paling lambat 5 bulan	
	- Penetapan Perda RPJMD																■	■	■	■									Paling lambat 6 bulan (Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 ditetapkan setelah penetapan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik)	

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025-2029



Bab 1 Pendahuluan

Dasar-dasar penyusunan RPJMD 2025-2029 (latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, sistematika dokumen)

Bab 2 2.1 Gambaran Umum Daerah

Karakteristik daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, pelayanan umum, dan aspek penunjang pembangunan lainnya

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Realisasi APBD periode sebelumnya dan proyeksi keuangan daerah periode 2025-2029

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah

Bab 3 3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi dan Misi pembangunan yang dijabarkan kedalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2025-2029

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas

Strategi dan arah kebijakan daerah serta program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab 4 4.1 Program Perangkat Daerah

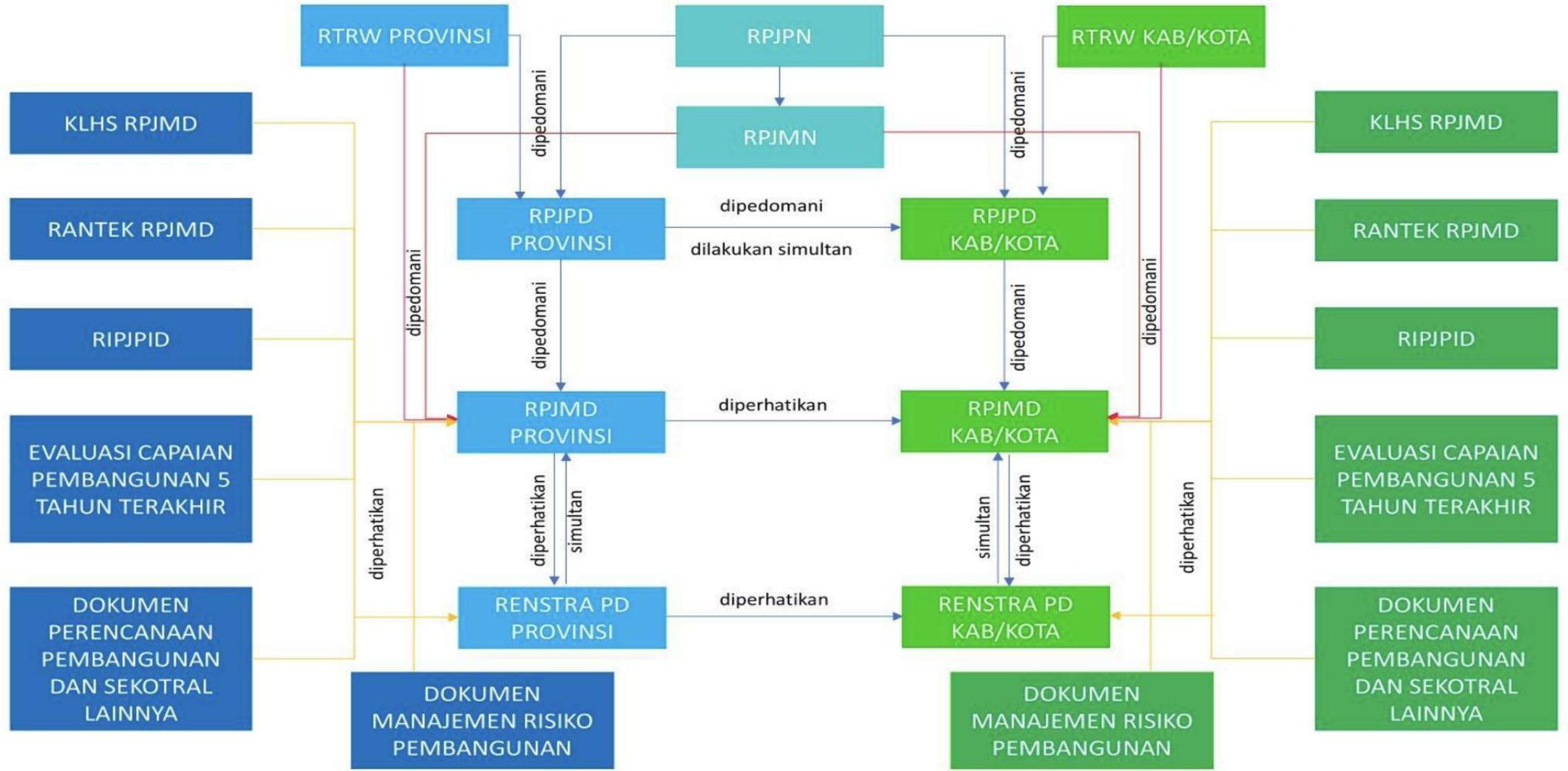
Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta indikator program, target dan pagu indikatif

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

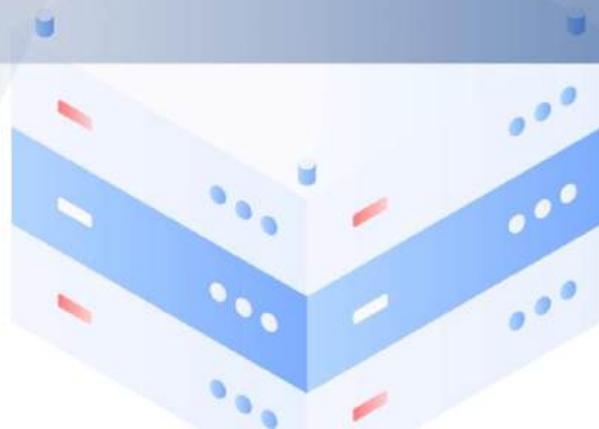
Bab 5 Penutup

KETERKAITAN DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA (INMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2025)





GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN BANGGAI



PROFIL KABUPATEN BANGGAI 2024

TOPOGRAFI

LUAS WILAYAH
8232,47 KM²



GARIS PANTAI
809,24 KM



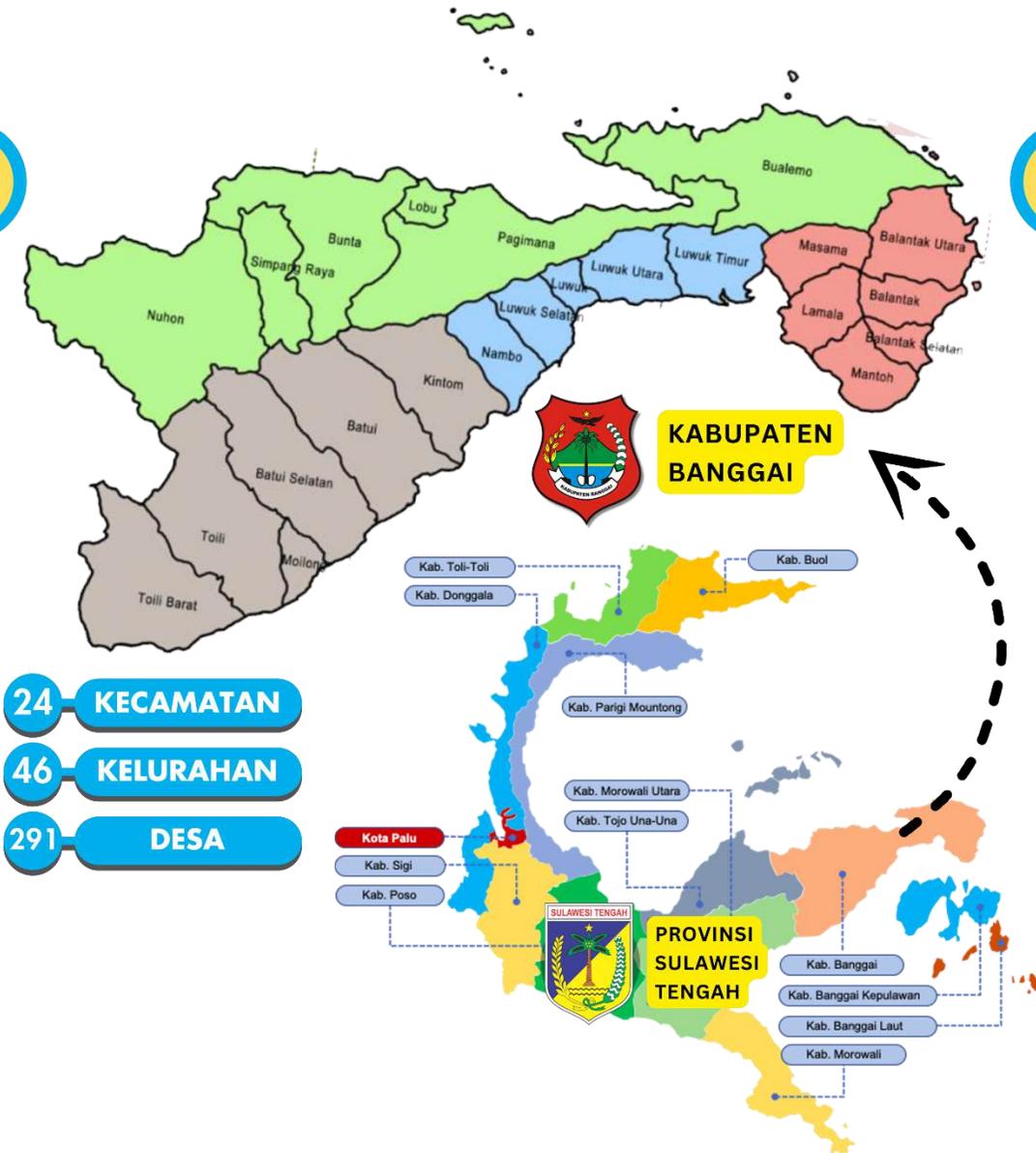
LUAS PERAIRAN
20.309,68 KM



JUMLAH PULAU
62 PULAU



JUMLAH GUNUNG
8 GUNUNG



- 24 **KECAMATAN**
- 46 **KELURAHAN**
- 291 **DESA**

DEMOGRAFI



JUMLAH PENDUDUK
377.804 JIWA



LAKI-LAKI
191.889 JIWA



PEREMPUAN
185.915 JIWA

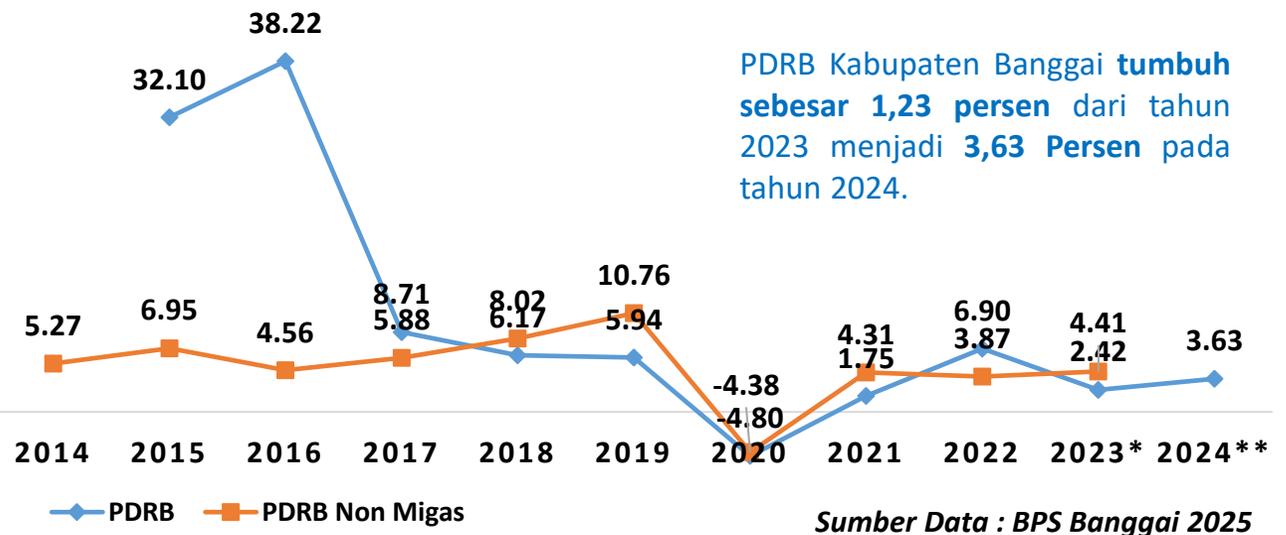
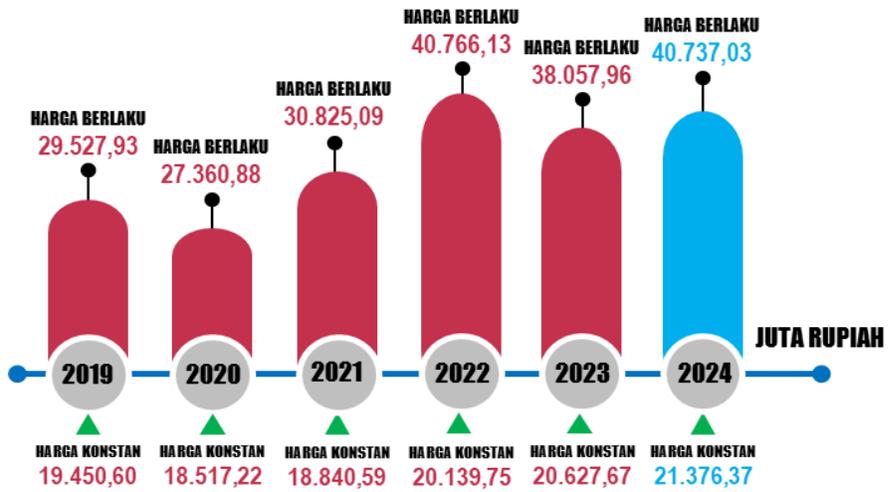


PERTUMBUHAN PENDUDUK
0,78 PERSEN



ANGKATAN KERJA
204.604 JIWA

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

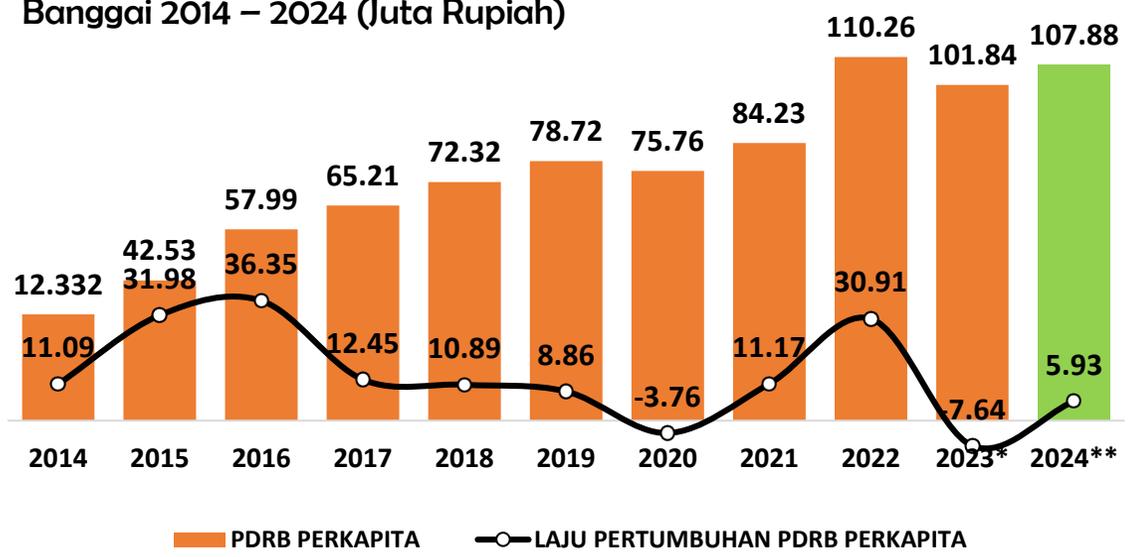


PDRB Kabupaten Banggai tumbuh sebesar 1,23 persen dari tahun 2023 menjadi 3,63 Persen pada tahun 2024.

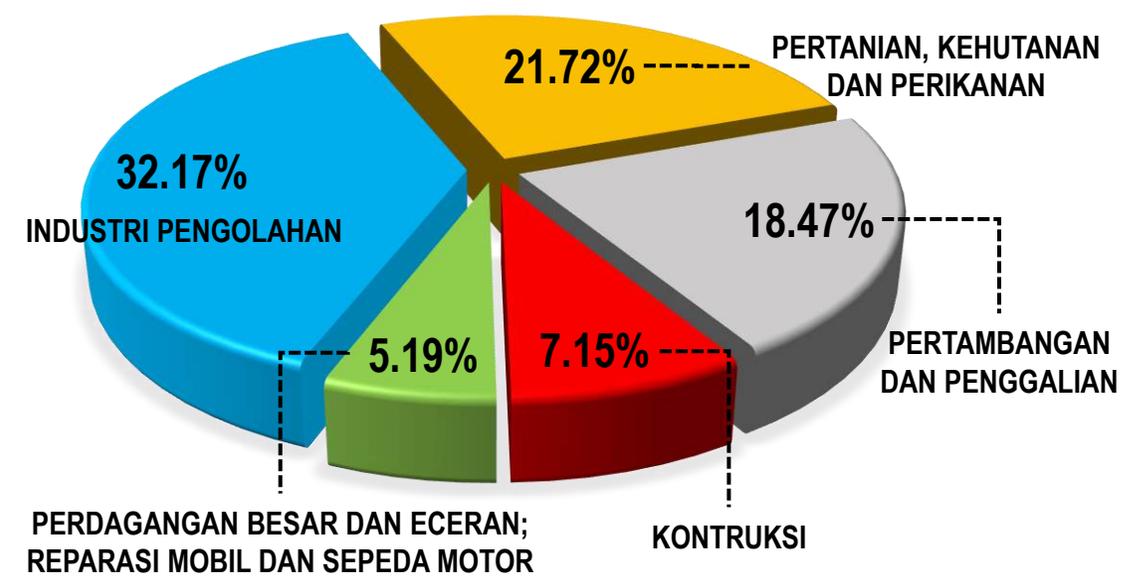
Sumber Data : BPS Banggai 2025

Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Banggai 2014 – 2024 (Juta Rupiah)

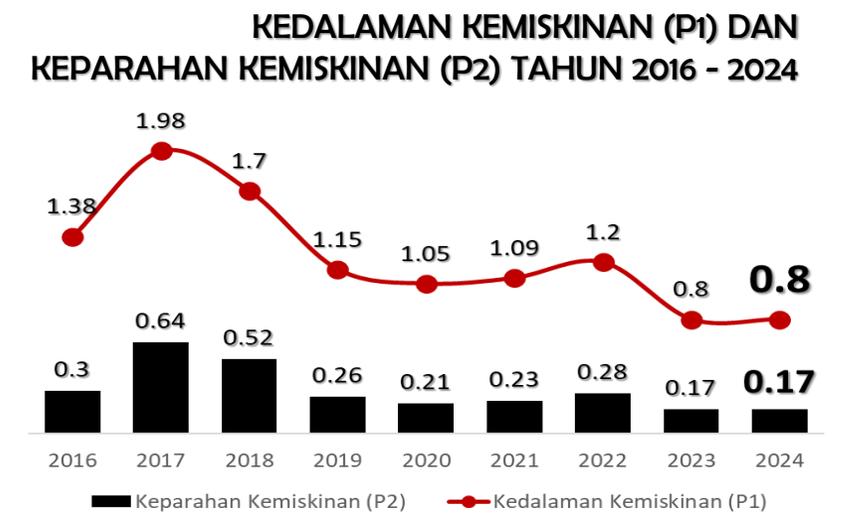
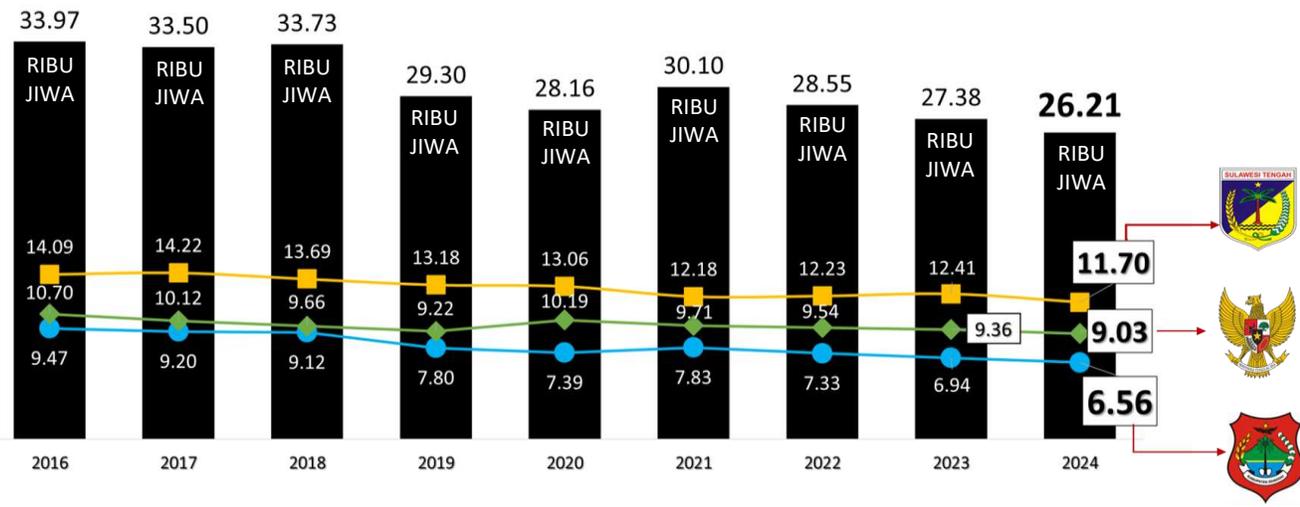
Sumber Data : BPS Banggai 2025



STRUKTUR PDRB KAB. BANGGAI MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2024



ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

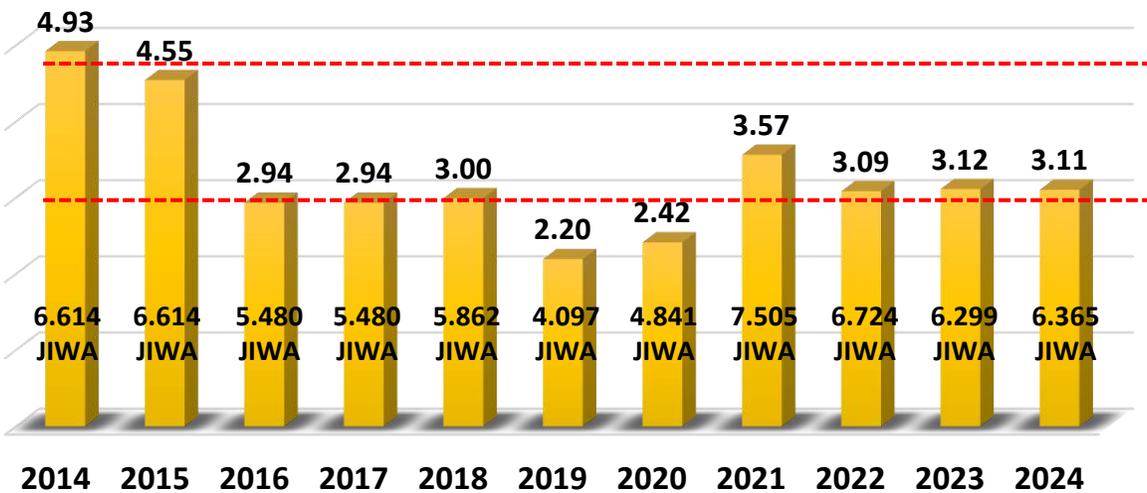


- Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 6,56 persen, menurun sebesar 0,38 persen poin terhadap Maret 2023.
- Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 26,21 ribu orang, menurun sebesar 1,17 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2023.
- Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp. 515.334,-/kapita/bulan. Perbandingan garis kemiskinan saat ini dengan tahun sebelumnya naik sebesar Rp. 26.546,-/kapita/bulan.
- Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 0,86, naik dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,80. Angka ini merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2024 adalah sebesar 0,17, sama dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0,17. Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.
- Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah pada Maret 2024 berada jauh di atas persentase penduduk miskin di Kabupaten Banggai, yaitu sebesar 11,77 persen. Persentase penduduk miskin Kabupaten Banggai pada Maret 2024 mengalami penurunan dibandingkan Maret 2023. Hal ini berbanding lurus dengan Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami penurunan persentase penduduk miskin pada Maret 2024.
- Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, persentase penduduk miskin Kabupaten Banggai merupakan terendah kedua setelah Kota Palu.

TABEL KEMISKINAN MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

NAMA	Jml Penduduk Miskin (dalam ribuan)	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
Banggai Kepulauan	14,86	12,32	1,26	0,22	453.552
Banggai	26,21	6,56	0,86	0,17	515.334
Morowali	14,99	11,55	1,79	0,43	590.027
Poso	39,63	14,23	1,97	0,45	620.267
Donggala	47,68	15,30	3,00	0,75	438.396
Toli-Toli	30,39	12,45	1,73	0,42	441.975
Buol	23,05	13,08	2,20	0,47	477.640
Parigi Moutong	74,57	14,20	3,36	1,08	553.012
Tojo Una-Una	26,12	16,36	2,04	0,40	622.000
Sigi	29,80	12,06	2,52	0,70	463.011
Banggai Laut	11,16	13,78	1,76	0,35	443.877
Morowali Utara	16,74	11,95	1,89	0,39	594.137
Kota Palu	24,57	5,94	0,65	0,09	658.112
Prov Sulawesi Tengah	379,76	11,77	2,10	0,53	600.872

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024



Sumber Data : BPS Kab. Banggai 2025, di olah

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2024 sebesar 71,70 persen, dengan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 204,60 ribu orang. TPAK pada Agustus 2024 tetap sama jika dibandingkan tahun sebelumnya.
- Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan TPAK perempuan. TPAK laki-laki sebesar 86,46 persen, sementara untuk perempuan sebesar 56,41 persen. Dalam tiga tahun terakhir, TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibanding TPAK perempuan.
- Lapangan pekerjaan yang memiliki persentase penduduk bekerja paling tinggi adalah sektor jasa-jasa (42,41 persen), kedua tertinggi adalah sektor pertanian (36,55 persen) dan terakhir adalah sektor manufaktur (21,04 persen).
- Berdasarkan status pekerjaannya, diantara penduduk yang bekerja paling banyak berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sebanyak 33,13 persen penduduk yang bekerja, bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pada tahun sebelumnya, persentase tertinggi juga pada kategori buruh/karyawan/pegawai.
- Sebesar 35,85 persen orang yang bekerja, memiliki tingkat pendidikan SD/ sederajat ke bawah. Kategori ini merupakan persentase yang paling tinggi dibandingkan kategori pendidikan lainnya. Pada tahun sebelumnya, persentase tertinggi juga pada kategori pendidikan SD ke bawah.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,11 persen, turun 0,01 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023 yang sebesar 3,12 persen.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi sebesar 8,10 persen pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sama seperti pada tahun sebelumnya, TPT tertinggi berada pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

TPT KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI TENGAH 2024

Kabupaten/ Kota	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024
	persen (2)	persen (3)	persen (4)
Banggai Kepulauan	1,48	1,56	1,55
Banggai	3,09	3,12	3,11
Morowali	3,20	2,84	2,84
Poso	1,68	1,67	1,77
Donggala	2,84	2,79	2,79
Tolitoli	3,31	3,12	3,11
Buol	3,07	3,14	3,13
Pariigi Moutong	1,71	2,11	2,10
Tojo Una-Una	3,05	2,83	2,47
Sigi	3,01	2,60	2,55
Banggai Laut	3,60	3,64	3,60
Morowali Utara	2,25	2,23	2,38
Palu	6,15	5,65	5,63

Sumber Data : BPS Sulawesi Tengah 2025

KEADAAN KETENAGAKERJAAN, KABUPATEN BANGGAI AGUSTUS 2024

Berita Resmi Statistik No. 63/12/Th. II, 16 Desember 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Agustus 2021 - Agustus 2024 (persen)

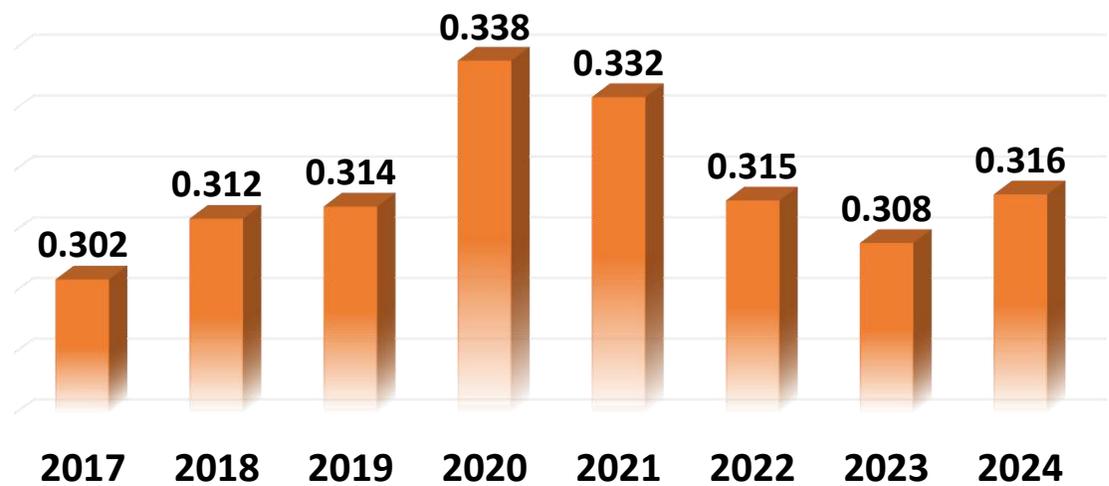
(TPT) Agustus 2024
3,11%

(TPAK) Agustus 2024
71,70%

Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2021- Agustus 2024



GINI RASIO KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024



NASIONAL = 0,308 – 0,402

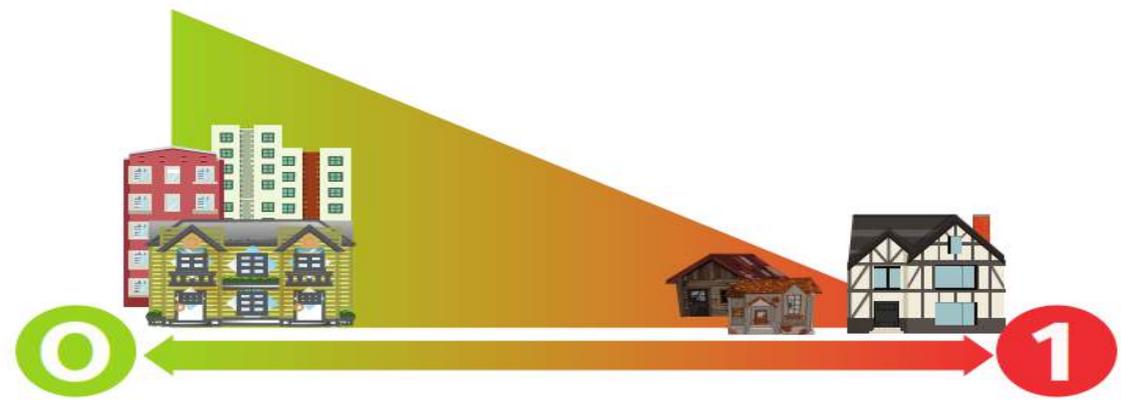


SULAWESI TENGAH = 0,309

Angka Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Kode Wilayah	Nama Wilayah	Gini Ratio
7201	Banggai Kepulauan	0,276
7202	Banggai	0,316
7203	Morowali	0,275
7204	Poso	0,247
7205	Donggala	0,251
7206	Tolitoli	0,277
7207	Buol	0,266
7208	Parigi Moutong	0,250
7209	Tojo Una-una	0,244
7210	Sigi	0,246
7211	Banggai Laut	0,221
7212	Morowali Utara	0,245
7271	Palu	0,337

Sumber: SUSENAS Maret 2024

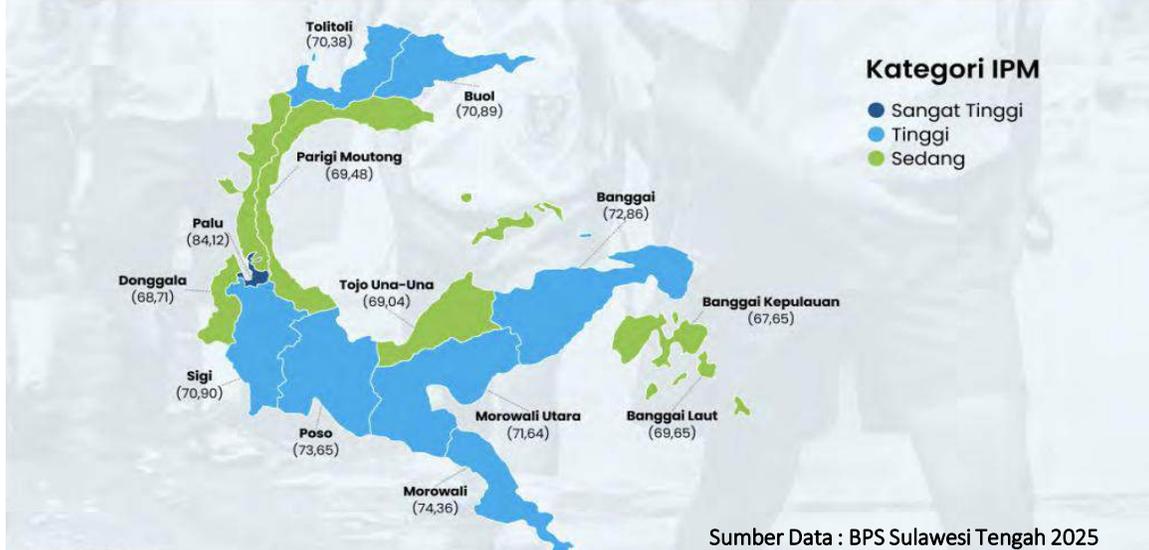


Bila Gini Ratio = 0, pengeluaran merata sempurna, artinya setiap orang memiliki pengeluaran yang sama dengan yang lainnya

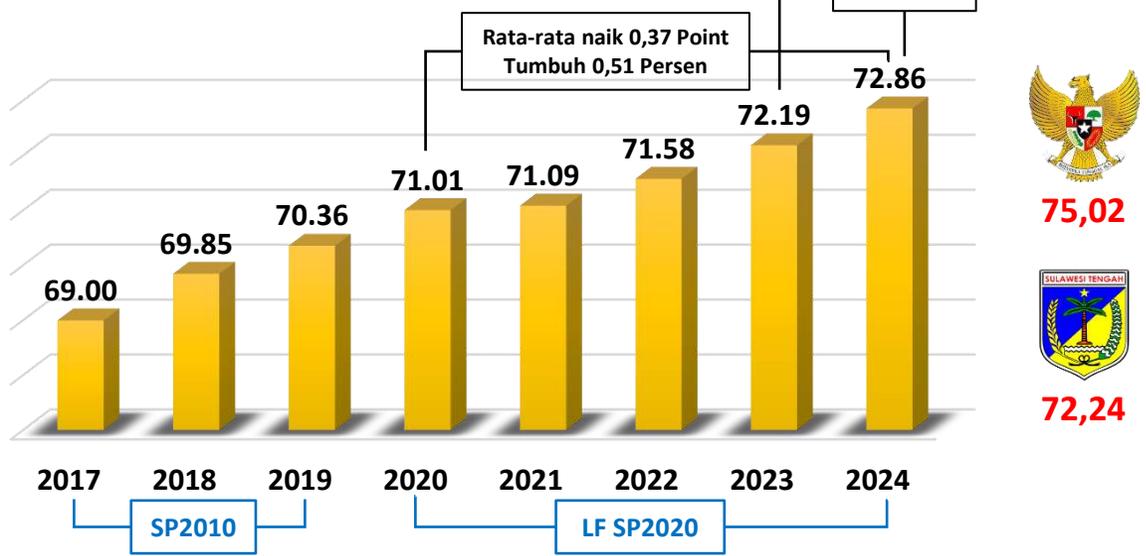


Bila Gini Ratio = 1, terjadi ketimpangan pengeluaran yang sempurna, artinya pengeluaran itu hanya dimiliki oleh satu orang atau satu kelompok saja dan yang lainnya tidak sama sekali

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024



IPM KABUPATEN BANGGAI 2017-2024



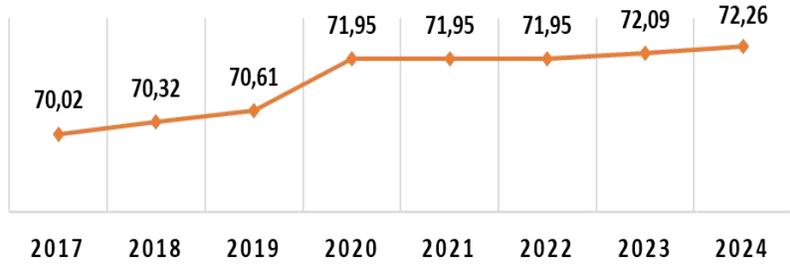
Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai terus mengalami kemajuan, dengan kategori **"Tinggi"**. Selama 2020-2024, IPM Kabupaten Banggai rata-rata meningkat sebesar **0,51 Persen** pertahun, dari **71,01** pada tahun 2020 menjadi **72,86** pada tahun 2024.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

INDIKATOR PEMBENTUK IPM KABUPATEN BANGGAI

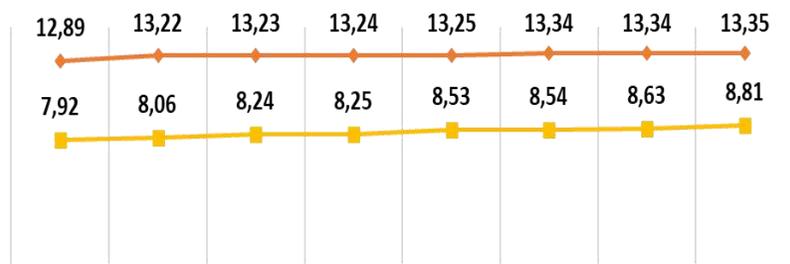
Umur Harapan Hidup saat Lahir/UHH (Tahun)

▲ Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2024 mencapai 72,26 tahun, **meningkat 0,14 tahun** dari tahun 2023.



Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun)

▲ Harapan Lama Sekolah (HLS) ditahun 2024 mencapai 13,35 tahun, **meningkat 0,01 tahun** dari tahun 2023.



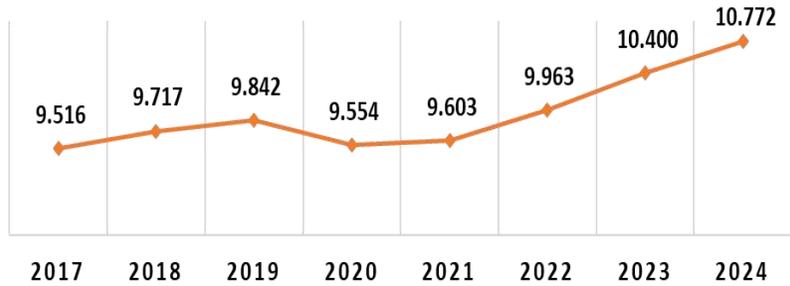
Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun)

▲ Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 **meningkat 0,09 tahun**, dari 8,63 tahun menjadi 8,81 tahun pada tahun 2024.



Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)

▲ Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita per tahun **meningkat 372 Ribu Rupiah (3,58 persen)** menjadi 10.772 Ribu Rupiah ditahun 2024



IPM KABUPATEN/KOTA SE-SULTENG TAHUN 2024

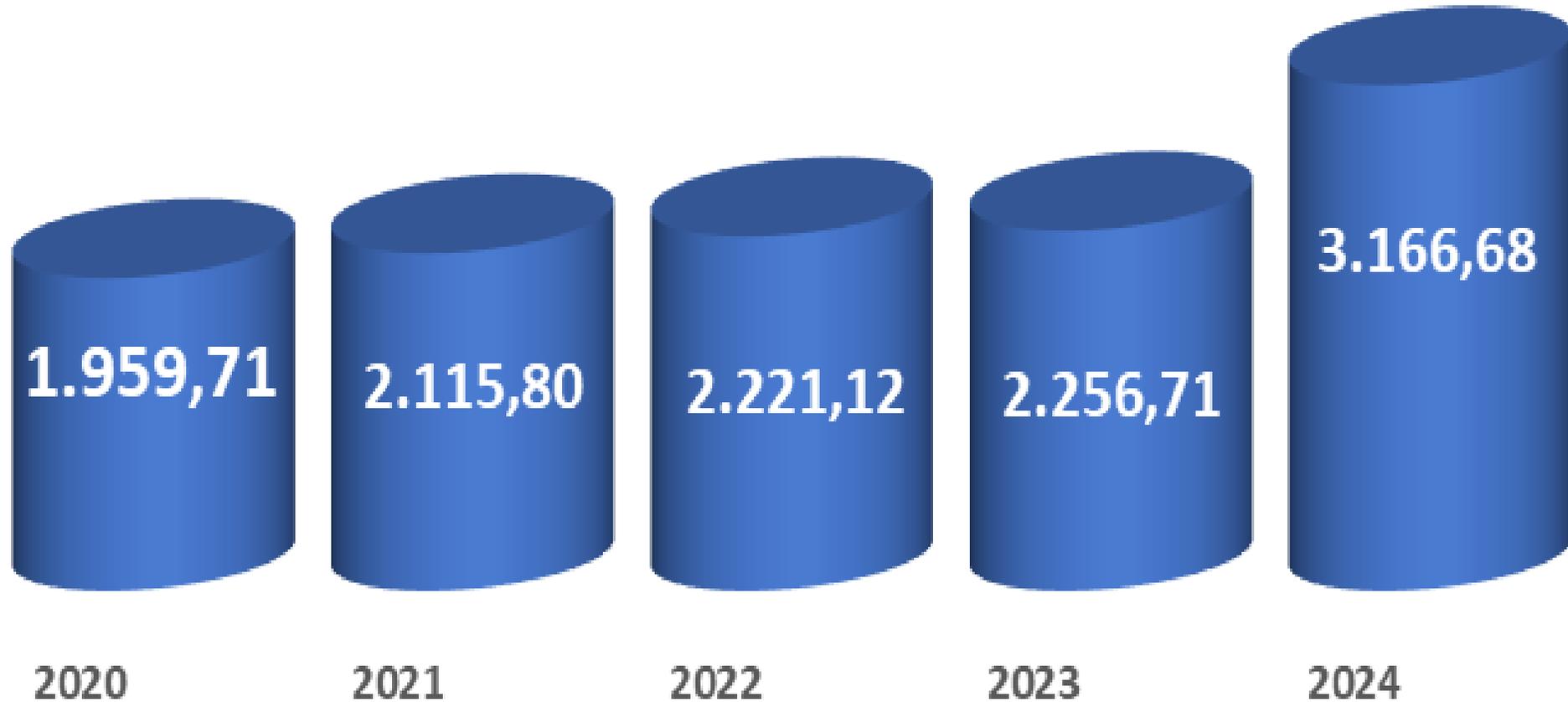
Kabupaten/Kota	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Riil per Kapita	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Banggai Kepulauan	67,54	13,11	8,70	8.375	67,65
Banggai	72,26	13,35	8,81	10.772	72,86
Morowali	71,09	13,39	9,38	12.281	74,36
Poso	73,02	13,75	9,54	9.948	73,65
Donggala	70,74	12,62	8,00	9.117	68,71
Toli-Toli	71,31	13,17	8,91	8.918	70,38
Buol	71,30	13,18	9,20	9.051	70,89
Parigi Moutong	68,72	12,52	8,05	10.846	69,48
Tojo Una-Una	71,05	12,43	8,56	8.863	69,04
Sigi	71,33	13,13	9,04	9.254	70,90
Banggai Laut	71,04	13,04	8,65	8.776	69,65
Morowali Utara	72,35	12,44	9,13	10.032	71,64
Kota Palu	73,91	16,52	11,75	15.941	84,12
Sulawesi Tengah	70,84	13,34	9,04	10.536	72,24

Keterangan:
 UHH : Umur Harapan Hidup dari hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)
 HLS : Harapan Lama Sekolah
 RLS : Rata-rata Lama Sekolah
 IPM : Indeks Pembangunan Manusia



GAMBARAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI 2020 - 2024

**PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 - 2024**



PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
PENDAPATAN -LRA	1.959.706.353.744,97	2.115.804.450.981,83	2.221.121.648.652,01	2.256.718.341.656,79	3.166.684.508.284,00	13,71
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	157.994.144.272,97	190.462.129.225,83	217.602.321.680,01	216.386.288.464,79	253.313.354.132,00	12,83
Pendapatan Pajak Daerah	50.713.072.147,76	65.390.332.182,44	61.950.375.592,44	68.015.598.651,15	116.168.011.100,00	25,85
Pendapatan Retribusi Daerah	11.509.556.305,44	9.887.216.809,39	14.325.178.092,00	20.645.658.613,33	27.282.576.950,00	23,39
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	2.989.217.754,00	3.813.505.652,75	3.962.201.302,68	5.714.244.284,00	2.600.000.000,00	1,91
Lain-lain PAD Yang Sah	92.782.298.065,77	111.371.074.581,25	137.364.566.692,89	122.010.786.916,31	107.262.766.082,00	4,68
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.715.437.686.819,00	1.867.053.767.116,00	1.947.559.446.372,00	2.014.310.234.952,00	2.886.010.712.964,00	14,93
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.429.584.691.213,00	1.500.743.051.838,00	1.619.287.389.501,00	1.696.369.090.390,00	2.598.281.383.788,00	17,65
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	234.192.435.000,00	311.186.169.000,00	250.001.275.000,00	247.311.422.000,00	220.792.341.000,00	3,03
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	51.660.560.606,00	55.124.546.278,00	67.450.781.871,00	68.209.722.562,00	64.516.988.176,00	6,19
Bantuan Keuangan			10.820.000.000,00	2.420.000.000,00	2.420.000.000,00	- 86,78
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	86.274.522.653,00	58.288.554.640,00	55.959.880.600,00	26.021.818.240,00	27.360.441.188,00	- 36,58
Pendapatan Hibah	73.914.522.653,00	9.036.704.640,00	8.169.572.923,00	5.641.246.503,00	2.515.559.000,00	- 49,40
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12.360.000.000,00	49.251.850.000,00	47.790.307.677,00	20.380.571.737,00	24.844.882.188,00	45,73

REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 - 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
BELANJA DAERAH	1.823.685.331.255,00	2.009.070.705.713,73	2.218.867.199.135,88	2.304.388.953.228,50	3.197.563.400.064,00	15,81
BELANJA OPERASI	1.280.622.999.749,00	1.412.083.627.951,22	1.569.021.843.285,88	1.562.700.563.060,50	2.137.396.233.798,00	14,44
Belanja Pegawai	748.722.942.274,00	758.945.563.959,00	773.187.852.134,00	792.226.768.174,50	1.049.065.642.013,00	9,53
Belanja Barang dan Jasa	439.833.945.362,00	627.186.944.290,72	745.594.249.688,88	683.840.464.468,00	960.489.312.909,00	23,41
Belanja Bunga		200.458.752,50				
Belanja Subsidi	403.840.000,00	403.840.000,00	403.800.000,00	403.713.720,00	404.000.000,00	0,01
Belanja Hibah	91.662.272.113,00	24.444.820.949,00	41.391.276.463,00	82.033.096.698,00	122.323.078.281,00	35,82
Belanja Bantuan Sosial	-	902.000.000,00	8.444.665.000,00	4.196.520.000,00	5.114.200.595,00	201,94
BELANJA MODAL	169.016.197.643,00	216.631.648.676,51	296.231.328.646,00	358.702.391.758,00	639.971.274.861,00	41,10
Belanja Modal - Tanah	355.548.475,00	251.494.220,00	-	540.059.109,00	3.430.000.000,00	
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	63.131.403.608,00	45.282.040.304,51	64.118.971.654,00	69.729.278.302,00	141.134.685.276,00	31,12
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	25.160.110.281,00	46.995.242.897,00	78.854.508.591,00	154.451.609.928,00	213.460.104.020,00	72,16
Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	80.278.231.879,00	123.230.853.685,00	152.509.584.401,00	133.597.972.919,00	281.131.485.565,00	43,82
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	90.903.400,00	872.017.570,00	748.264.000,00	375.471.500,00	260.000.000,00	191,13
Belanja Modal - Aset Lainnya				8.000.000,00	555.000.000,00	
BELANJA TAK TERDUGA	20.975.044.282,00	19.164.519.356,00	1.690.350.700,00	1.228.330.539,00	11.284.301.600,00	172,88
TRANSFER DAERAH	353.071.089.581,00	361.190.909.730,00	351.923.676.504,00	381.757.667.871,00	408.911.589.805,00	3,83
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	13.565.884.050,00	14.065.884.050,00	18.066.274.824,00	12.943.866.569,00	14.345.058.805,00	3,65
Bagi Hasil Pajak Daerah	10.532.934.050,00	11.032.934.050,00	13.417.671.334,00	12.943.866.569,00	14.345.058.805,00	8,41
Bagi Hasil Retribusi	3.032.950.000,00	3.032.950.000,00	4.648.603.490,00			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	339.505.205.531,00	347.125.025.680,00	333.857.401.680,00	368.813.801.302,00	394.566.531.000,00	3,97
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-			
Bantuan Keuangan Kepada Desa	338.746.616.500,00	344.825.025.680,00	333.857.401.680,00	368.813.801.302,00	394.566.531.000,00	4,02
Bantuan Keuangan Lainnya	758.589.031,00	2.300.000.000,00				

PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025 - 2029

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
PENDAPATAN -LRA	3.306.018.626.648,50	3.451.483.446.221,03	3.603.348.717.854,75	3.761.896.061.440,36	3.927.419.488.143,74
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	264.459.141.713,81	276.095.343.949,22	288.243.539.082,98	300.926.254.802,63	314.167.010.013,95
Pendapatan Pajak Daerah	121.279.403.588,40	126.615.697.346,29	132.186.788.029,53	138.003.006.702,83	144.075.138.997,75
Pendapatan Retribusi Daerah	28.483.010.335,80	29.736.262.790,58	31.044.658.353,36	32.410.623.320,91	33.836.690.747,03
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	2.714.400.000,00	2.833.833.600,00	2.958.522.278,40	3.088.697.258,65	3.224.599.938,03
Lain-lain PAD Yang Sah	111.982.327.789,61	116.909.550.212,35	122.053.570.421,69	127.423.927.520,25	133.030.580.331,14
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	3.012.995.184.334,42	3.145.566.972.445,13	3.283.971.919.232,72	3.428.466.683.678,96	3.579.319.217.760,83
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.712.605.764.674,67	2.831.960.418.320,36	2.956.566.676.726,45	3.086.655.610.502,42	3.222.468.457.364,52
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	230.507.204.004,00	240.649.520.980,18	251.238.099.903,30	262.292.576.299,05	273.833.449.656,21
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	67.355.735.655,74	70.319.388.024,60	73.413.441.097,68	76.643.632.505,98	80.015.952.336,24
Bantuan Keuangan	2.526.480.000,00	2.637.645.120,00	2.753.701.505,28	2.874.864.371,51	3.001.358.403,86
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	28.564.300.600,27	29.821.129.826,68	31.133.259.539,06	32.503.122.958,78	33.933.260.368,96
Pendapatan Hibah	2.626.243.596,00	2.741.798.314,22	2.862.437.440,05	2.988.384.687,41	3.119.873.613,66
Pendapatan Dana Darurat	25.938.057.004,27	27.079.331.512,46	28.270.822.099,01	29.514.738.271,36	30.813.386.755,30
BELANJA DAERAH	3.320.669.590.966,46	3.448.515.370.218,67	3.581.283.211.972,09	3.719.162.615.633,02	3.862.350.376.334,89
BELANJA OPERASI	2.219.685.988.799,22	2.305.143.899.367,99	2.393.891.939.493,66	2.486.056.779.164,17	2.581.769.965.161,99
Belanja Pegawai	1.089.454.669.230,50	1.131.398.673.995,87	1.174.957.522.944,72	1.220.193.387.578,09	1.267.170.832.999,84
Belanja Barang dan Jasa	997.468.151.456,00	1.035.870.675.287,05	1.075.751.696.285,60	1.117.168.136.592,60	1.160.179.109.851,41
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	419.554.000,00	435.706.829,00	452.481.541,92	469.902.081,28	487.993.311,41
Belanja Hibah	127.032.516.794,82	131.923.268.691,42	137.002.314.536,04	142.276.903.645,68	147.754.564.436,04
Belanja Bantuan Sosial	5.311.097.317,91	5.515.574.564,65	5.727.924.185,39	5.948.449.266,52	6.177.464.563,28
BELANJA MODAL	664.610.168.943,15	690.197.660.447,46	716.770.270.374,69	744.365.925.784,11	773.024.013.926,80
Belanja Modal - Tanah	3.562.055.000,00	3.699.194.117,50	3.841.613.091,02	3.989.515.195,03	4.143.111.530,04
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	146.568.370.659,13	152.211.252.929,50	158.071.386.167,29	164.157.134.534,73	170.477.184.214,32
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	221.678.318.024,77	230.212.933.268,72	239.076.131.199,57	248.280.562.250,75	257.839.363.897,41
Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	291.955.047.759,25	303.195.317.097,98	314.868.336.806,26	326.990.767.773,30	339.579.912.332,57
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	270.010.000,00	280.405.385,00	291.200.992,32	302.412.230,53	314.055.101,40
Belanja Modal - Aset Lainnya	576.367.500,00	598.557.648,75	621.602.118,23	645.533.799,78	670.386.851,07
BELANJA TAK TERDUGA	11.718.747.211,60	12.169.918.979,25	12.638.460.859,95	13.125.041.603,06	13.630.355.704,77

PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025 - 2029

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
TRANSFER DAERAH	424.654.686.012,49	441.003.891.423,97	457.982.541.243,80	475.614.869.081,68	493.926.041.541,33
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	14.897.343.568,99	15.470.891.296,40	16.066.520.611,31	16.685.081.654,85	17.327.457.298,56
Bagi Hasil Pajak Daerah	14.897.343.568,99	15.470.891.296,40	16.066.520.611,31	16.685.081.654,85	17.327.457.298,56
Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	409.757.342.443,50	425.533.000.127,58	441.916.020.632,49	458.929.787.426,84	476.598.584.242,77
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Kepada Desa	409.757.342.443,50	425.533.000.127,58	441.916.020.632,49	458.929.787.426,84	476.598.584.242,77
Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT	14.650.964.317,97	2.968.076.002,36	22.065.505.882,66	42.733.445.807,35	65.069.111.808,85
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	48.965.500.000,00	53.762.050.000,00	59.038.255.000,00	64.842.080.500,00	71.226.288.550,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	47.965.500.000,00	52.762.050.000,00	58.038.255.000,00	63.842.080.500,00	70.226.288.550,00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	34.314.535.682,03	50.793.973.997,64	81.103.760.882,67	107.575.526.307,34	136.295.400.358,85
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	33.314.535.682,03	49.793.973.997,64	80.103.760.882,67	106.575.526.307,34	135.295.400.358,85
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	14.650.964.317,97	2.968.076.002,36	22.065.505.882,67	42.733.445.807,34	65.069.111.808,85



BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif #melayani
bangsa

RANCANGAN AWAL VISI, MISI, SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN (RPJMD 2025-2029)



VISI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025 - 2029



VISI INDONESIA 2025-2029

**“Bersama Indonesia Maju,
Menuju Indonesia Emas
2045”**

Pembangunan memerlukan **kerja sama** seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad **berdasarkan fondasi yang telah dibangun** oleh pemerintah sebelumnya untuk **mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.**



VISI SULAWESI TENGAH 2025 - 2029

**“ BERANI MEWUJUDKAN
SULAWESI TENGAH SEBAGAI
WILAYAH PERTANIAN DAN
INDUSTRI YANG MAJU DAN
BERKELANJUTAN 2025-2029 ”**



VISI RPJPD KAB. BANGGAI 2025 - 2045

**BANGGAI SEBAGAI GERBANG TIMUR SULAWESI
TENGAH YANG MAJU DAN BERKELANIUTAN MELALUI
INDUSTRI KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM
(BANGGAI EMAS 2045)**



VISI RPJMD KAB. BANGGAI 2025 - 2029

**“ BERGERAK BERSAMA
BERKELANJUTAN MENUJU
GERBANG TIMUR SULAWESI
TENGAH”
(GERAKAN BANGGAI Terdepan,
Inovatif, MajU dan sejahteRa)**

BERGERAK BERSAMA *COLLABORATIVE GOVERNMENT HEXAHELIX*

Sebagai fasilitator penggerak, serta Pemimpin yang mengkoordinasi berbagai sektor untuk mencapai tujuan bersama

Memberikan sumbangsih melalui riset, inovasi dan pemikiran strategis yang dapat mendasari kebijakan publik, serta mengimplementasikan dan mengontrol program berbasis kompetensi SDM

Partisipasi Pembangunan bagi organisasi keagamaan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga swadaya masyarakat



Memberikan masukan, kritik, dan partisipasi dalam proses Pembangunan, agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan

Menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong perekonomian lokal serta berkontribusi terhadap Pembangunan infrastruktur dan investasi di Kabupaten Banggai

Sebagai penghubung antara Pemerintah dan Masyarakat melalui media. Kebijakan dapat disosialisasikan dengan lebih luas dan Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat serta dapat mempromosikan potensi Kabupaten Banggai dan mendiseminasi keberhasilan pembangunan

GERBANG TIMUR di makanakan sebagai Kondisi Kabupaten Banggai sebagai pusat pelayanan pendidikan, Kesehatan, perdagangan, jasa, industri pertanian, perikanan/kelautan, pertambangan dan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kawasan Timur Sulawesi Tengah.



KABUPATEN BANGGAI
Gerbang Timur Sulawesi Tengah, sekaligus sebagai Gerbang Timur Pulau Sulawesi





VISI DAN MISI BUPATI BANGGAI 2025-2029



**“BERGERAK BERSAMA BERKELANJUTAN
MENUJU GERBANG TIMUR SULAWESI
TENGAH (GERAKAN BANGGAI TERDEPAN,
INOVATIF, MAJU DAN SEJAHTERA)”**



MISI 1 | **SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL,
BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING**



MISI 2 | **EKONOMI DAERAH TANGGUH DAN
INKLUSIF BERBASIS POTENSI UNGGULAN**



MISI 3 | **PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA
BERKUALITAS, MERATA DAN RAMAH
LINGKUNGAN**



MISI 4 | **PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG
MERATA DAN BERKEADILAN**



MISI 5 | **TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BAIK DAN INOVATIF**



NAWAITU

9

PROGRAM UNGGULAN KREATIF INOVATIF
PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WIN)
PROGRAM AKSI

9 PROGRAM UNGGULAN KREATIF DAN INOVATIF

GERBANG DALAM VISI MISI BUPATI	GERBANG DALAM RPJMD 2025 - 2029
1. GERBANG SEHAT , Gerakan Banggai untuk mewujudkan derajat Kesehatan Masyarakat yang tinggi.	1. GERBANG SEHAT , Gerakan Banggai untuk mewujudkan derajat Kesehatan Masyarakat yang tinggi.
2. GERBANG CERDAS , Gerakan Banggai untuk mewujudkan generasi cerdas, berahlak dan berbudi pekerti luhur serta menguasai IPTEK.	2. GERBANG CERDAS , Gerakan Banggai untuk mewujudkan generasi cerdas, berahlak dan berbudi pekerti luhur serta menguasai IPTEK.
3. GERBANG PRODUKTIF , Gerakan Banggai untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil, sesuai dengan tuntutan pasar kerja.	3. GERBANG PRODUKTIF SEJAHTERA , Gerakan Banggai untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil, sesuai dengan tuntutan pasar kerja, pengangguran berkurang, ekonomi produktif, investasi meningkat dan Tanpa miskin ekstrim,
4. GERBANG BERBUDAYA , Gerakan Banggai untuk melestarikan nilai – nilai budaya BAbasalan	4. GERBANG BERBUDAYA , Gerakan Banggai untuk melestarikan nilai – nilai budaya BAbasalan serta pengembangan pariwisata daerah (alam dan Budaya).
5. GERBANG DESA , Gerakan Banggai membangun Desa untuk mencapai Desa Maju dan Mandiri.	5. GERBANG DESA , Gerakan Banggai membangun Desa untuk mencapai Desa Maju dan Mandiri.

6. GERBANG PANGAN , Gerakan Banggai untuk meningkatkan nilai tambah potensi pertanian, perikanan dan kelautan, dan peternakan.	6. GERBANG PANGAN Gerakan Banggai untuk meningkatkan nilai tambah potensi pertanian, perikanan dan kelautan, dan peternakan, serta Gerakan Banggai untuk pemasalan pemanfaatan pekarangan oleh rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten Banggai.
8. GERBANG PEKARANGAN , Gerakan Banggai untuk pemasalan pemanfaatan pekarangan oleh Rumah Tangga di seluruh wilayah Kabupaten Banggai.	
7. GERBANG DIGITAL , Gerakan Banggai untuk mempercepat terlaksananya Transformasi Digital di berbagai sektor.	7. GERBANG DIGITAL DAN TERANG , Gerakan Banggai untuk mempercepat terlaksananya Transformasi Digital di berbagai sektor serta Gerakan Banggai untuk mewujudkan akses Masyarakat terhadap penerangan Listrik Rumah Tangga maupun penerangan jalan
9. GERBANG TERANG , Gerakan Banggai untuk mewujudkan akses Masyarakat terhadap penerangan Listrik Rumah Tangga maupun penerangan jalan	
	8. GERBANG LAYAK, BERSIH DAN LANCAR , Gerakan Banggai untuk pemenuhan sarana prasarana dasar (perumahan, air bersih, sanitasi layak), Banggai (Luwuk) Bersih, Lingkungan Hidup Terjaga dan Mitigasi Bencana serta Pemenuhan infrastruktur jalan dan jembatan.
	9. GERBANG AMANAH , Gerakan Banggai untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Inovatif dan Akuntabel. serta ketentaraman dan ketertiban Masyarakat.

9

PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)

1. Kabupaten/Kota Pintar dan Desa Pintar.
2. Puskesmas BLUD dan Rumah Sakit tipe D dan C
3. Tuntas Wajar 9 Tahun menuju Wajar 13 Tahun
4. Germas Pemanfaatan Pekarangan.
5. Kecamatan/Kelurahan/Desa Maju dan Mandiri
6. PI 10 % melalui BUMD Banggai Energi Utama
7. Luwuk Water Front City, Green and Clean City dan Luwuk Kota Gas.
8. Pusat Perkantoran Halimun
9. Perguruan Tinggi Maju dan Unggul

9 PROGRAM AKSI

1. **TANPA PUNGUTAN**, dalam semua bentuk pelayanan Pendidikan, Kesehatan, perizinan, serta layanan pemerintahan dan layanan publik lainnya.
2. **TANPA MISKIN EKSTRIM**, di lakukan melalui inovasi **TUMIS IKAN TERI** (Tuntaskan Kemiskinan Melalui Kegiatan Terintegrasi), untuk menjaga tumbuhnya miskin ekstrim baru , maupun kemiskinan absolut lainnya.
3. **TANPA KEKUMUHAN**, yaitu mengentaskan Kawasan Kumuh menjadi Kawasan yang layak huni.
4. **TANPA SAMPAH**, sebagai program untuk mewujudkan Luwuk Green and Clean city.
5. **BEBAS GELAP**, sebagai kelanjutan dari **BANGGAI Terang**, untuk peningkatan akses Masyarakat terhadap Listrik rumah tangga dan penerangan jalan.
6. **TANPA PUTUS SEKOLAH**, sebagai kelanjutan inovasi Anak dan Dewasa Kembali ke sekolah.
7. **AMBULANCE DERING**, sebagai pengembangan dari Inovasi Ambulance Dering Ibu Hamil, yang di perluas kepada seluruh jenis pelayanan Kesehatan, dengan jangkauan yang di perluas.
8. **GERMAS PEMANFAATAN PEKARANGAN**, sebagai pengembangan dari Inovasi 1 Juta 1 Pekarangan, akan di masalkan kepada seluruh Rumah Tangga di pewartaan dan perdesaan menjadi Gerakan Masal/Masyarakat.
9. **UGD KEMISKINAN**, merupakan Unit Gawat Darurat yang bertugas melayani dan menyelesaikan masalah-masalah yang di alami Masyarakat miskin secara cepat, tepat dan responsif.

GERBANG CERDAS

1. Bea Siswa Untuk Siswa dan Mahasiswa Miskin
2. Bea Siswa untuk Guru.
3. Hibah Pengembangan untuk Perguruan Tinggi Daerah
4. Penerapan Dana Operasional Sekolah (DOS) untuk mendukung BOS
5. Dukungan pembelajaran berbasis digital
6. Pengembangan perpustakaan digital dan perpustakaan daerah
7. Pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana PAUD, SD dan SMP sesuai standar
8. Gerakan kembali ke sekolah bagi anak putus sekolah dan dewasa tidak sekolah (ADE kembali sekolah)
9. Tanpa pungutan di sekolah

GERBANG SEHAT

1. Kesehatan Gratis melalui Cakupan Kepesertaan BPJS Kesehatan (UHC Prioritas).
2. Status BLUD untuk 27 Puskesmas
3. Rintisan Rumah Sakit Tipe C atau D di 4 wilayah prioritas.
4. Pengembangan Sarana Prasarana dan Peningkatan kualitas layanan RSUD Luwuk sebagai Rumah Sakit Rujukan.
5. Dukungan Makan Bergizi Gratis
6. Peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan Tingkat Pertama.
7. Penurunan kematian Ibu dan Bayi melalui penguatan pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, peningkatan cakupan dan kualitas antenatal care, kunjungan neonatal dan nifas sesuai standar, melalui pengembangan Inovasi Ambulance dering Ibu Hamil.
8. Penurunan Stunting melalui penanggulangan KEK pada Ibu Hamil, Pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi gizi mikro, pemenuhan ASI eksklusif dan pendampingan pada keluarga beresiko stunting serta Pengembangan inovasi Stunting
9. Pengembangan Olah Raga Masal untuk pola hidup sehat.
10. Pemerataan Tenaga Kesehatan

GERBANG BERBUDAYA

1. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan BABASALAN (seni, adat istiadat, bahasa daerah, cagar budaya, museum daerah dan olah raga tradisional)
2. Pengembangan 4 destinasi pariwisata prioritas (KM 5, Teluk Lalong, Salodik dan Pulo Dua).
3. Pengembangan Kampung /Desa Wisata)
4. Moderasi Beragama dan pengembangan wawasan kebangsaan.

GERBANG DESA

1. Satu BUMDes 500 Juta
2. Dukungan Koperasi Merah Putih
3. Desa Maju dan Mandiri
4. Desa/Kampung Wisata dan Tematik Lainnya

GERBANG PANGAN

1. Germas pemanfaatan pekarangan, pengembangan 1 Juta 1 Pekarangan.
2. Banggai Sejuta Ternak
3. Pengarusutamaan produk unggulan kelapa
4. Bantuan Alat Tangkap dan Budidaya ikan.
5. Banggai Smart Farming.
6. Industrialisasi pangan untuk diversifikasi dan daya saing produk pangan.

GERBANG DIGITAL DAN TERANG

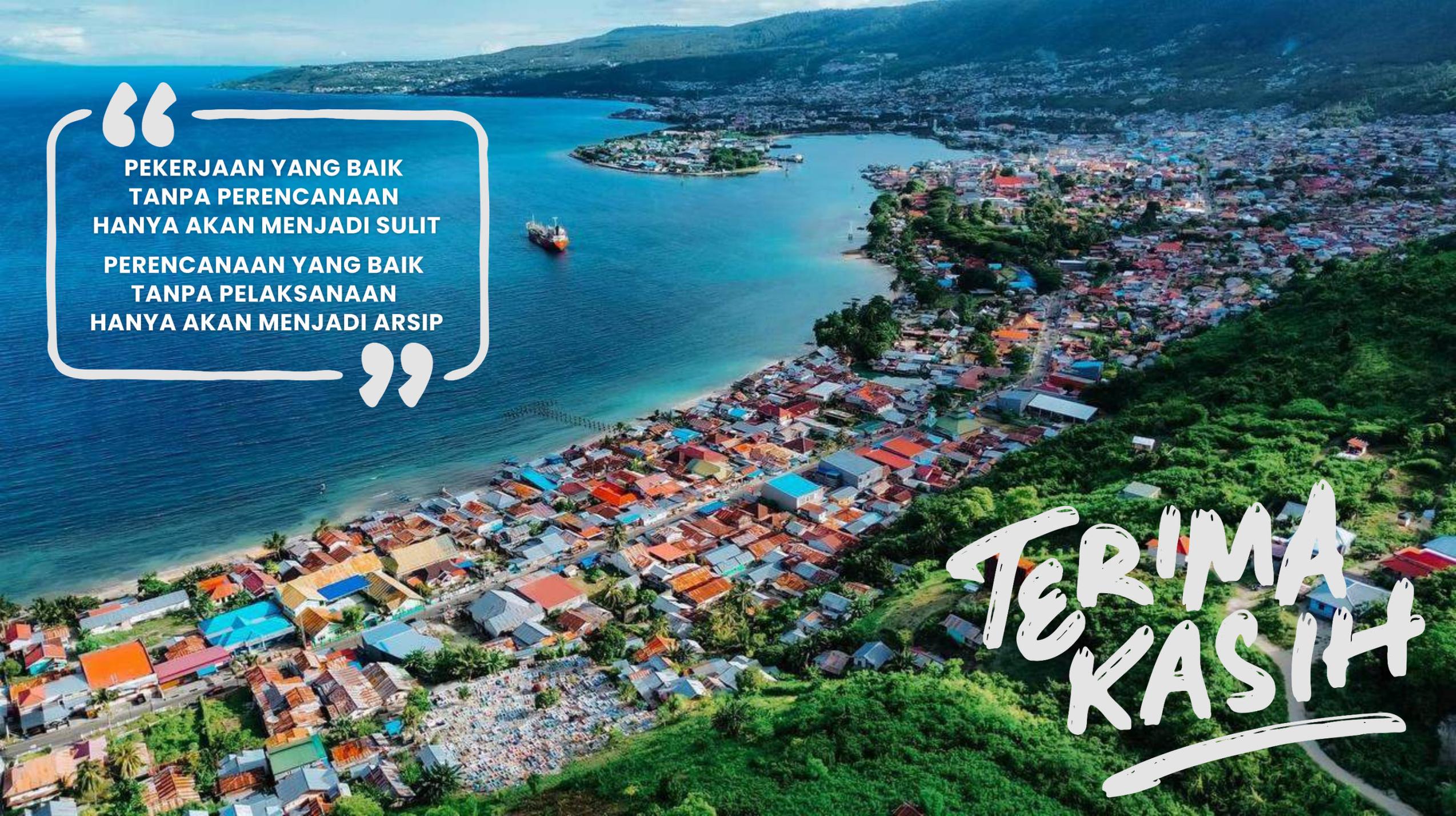
1. Bebas Gelap (Akses Rumah Tangga ke listrik PLN dan Lampu Jalan).
2. Bebas Blank Spot
3. KabupatenKota pintar dan Desa pintar.
4. Banggai Comand Centre
5. Penarapan open Data, Satu Data Banggai.
6. Penguatan SDM Digital
7. Peningkatan Infrastruktur TIK
8. Digitasilisasi Sektor ekonomi (koperasi Modern dan UMKM Go Digital)
9. Pengembangan Platform Digital

GERBANG LAYAK, BERSIH DAN LANCAR

1. Banggai Tanpa Kekumuhan.
2. Rintisan penerapan *Smart Water Grid Management* (SWGGM) atau PDAM pintar.
3. Pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir menuju ekonomi sirkular
4. Peningkatan kemantapan jalan Kabupaten.
5. Penataan Luwuk *Water Front City, Green and Clean City* dan Luwuk Kota Gas
6. Kawasan Perkantoran Halimun
7. Penanganan Banjir Kota Luwuk

GERBANG AMANAH

1. Banggai RB dan SAKIP A.
2. Digitalisasi pelayanan publik
3. Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Penguatan kembali Laboratorium Inovasi untuk mewujudkan Banggai Inovatif.
5. Kolaborasi pelaku Pembangunan dengan pendekatan HEXAHELIX.
6. Perencanaan dan Penganggaran untuk APBD Sehat.
7. Penerapan System merit dan manajemen talenta.
8. Peningkatan Fiskal Daerah

An aerial photograph of a coastal town. The town is built on a hillside that descends to a bay. The houses have colorful roofs in shades of red, orange, blue, and grey. A large ship is visible in the bay. In the background, there are green hills and a clear blue sky. A white speech bubble is overlaid on the left side of the image, containing text. In the bottom right corner, the words 'TERIMA KASIH' are written in a large, white, hand-drawn font.

**PEKERJAAN YANG BAIK
TANPA PERENCANAAN
HANYA AKAN MENJADI SULIT
PERENCANAAN YANG BAIK
TANPA PELAKSANAAN
HANYA AKAN MENJADI ARSIP**

**TERIMA
KASIH**